

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya demokrasi adalah partisipasi seluruh rakyat dalam mengambil keputusan politik dan menjalankan pemerintahan. Keputusan politik yang dimaksud adalah kesepakatan yang ditetapkan menjadi sebuah aturan yang mengatur kehidupan seluruh rakyat itu sendiri. Keterlibatan atau partisipasi rakyat adalah hal yang sangat mendasar dalam demokrasi karena demokrasi tidak hanya berkaitan dengan tujuan sebuah ketetapan yang dihasilkan oleh suatu pemerintahan, tetapi juga berkaitan dengan seluruh proses dalam membuat ketetapan itu sendiri.<sup>1</sup>

Demokrasi yang dianut di Indonesia yaitu demokrasi berdasarkan Pancasila masih dalam tarap perkembangan dan mengenai sifat-sifat dan ciri-cirinya terdapat berbagai tafsiran serta pandangan. Tetapi yang tidak dapat disangkal ialah bahwa beberapa nilai pokok dari demokrasi konstitusional cukup jelas tersirat di dalam UUD 1945 yang belum diamandemen. Selain itu UUD kita menyebut secara eksplisit dua prinsip yang menjiwai naskah itu dan yang dicantumkan dalam penjelasan UUD 1945 mengenai sistem Pemerintahan Negara yaitu:

1. Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*). Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtsstaat*).
2. Sistem konstitusional, pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi (Hukum Dasar), tidak bersifat Absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).

---

<sup>1</sup> Sahya Anggara, *Sistem Politik Indonesia*, (Bandung: CV Pustaka Setia) Hal, 290.

Berdasarkan dua sistem *Rechtsstaat* dan sistem konstitusi, maka jelaslah bahwa demokrasi yang menjadi dasar dari Undang-undang Dasar 1945 yang belum diamandemen ialah demokrasi konstitusional. Di samping itu corak khas demokrasi Indonesia yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dimuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar.<sup>2</sup>

Langkah terobosan yang dilakukan dalam proses demokratisasi adalah amandemen UUD 1945 yang dilakukan oleh MPR hasil pemilu 1999 dalam empat tahap selama empat tahun (1999-2002). Beberapa perubahan penting dilakukan terhadap UUD 1945 agar mampu menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Peranan DPR sebagai lembaga legislatif di perkuat, semua anggota DPR dipilih dalam pemilu, pengawasan terhadap presiden lebih diperketat dan hak asasi manusia memperoleh jaminan yang semakin kuat. Amandemen UUD 1945 juga memperkenalkan pemilihan umum untuk memilih presiden dan wakil presiden secara langsung (pilpres). Pilpres pertama dilakukan pada tahun 2004 setelah pemilihan umum untuk lembaga legislatif.

Pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilihan presiden pada tahun 2004 merupakan tonggak sejarah politik penting dalam sejarah politik Indonesia modern karena terpilihnya presiden dan wakil presiden yang didahului oleh terpilihnya anggota-anggota DPR, DPD dan DPD telah menuntaskan demokratisasi di bidang lembaga-lembaga politik di Indonesia. Dapat dikatakan bahwa demokratisasi telah berhasil membentuk pemerintah Indonesia yang demokratis karena nilai-nilai

---

<sup>2</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama), Hal 106.

demokrasi yang penting telah diterapkan melalui pelaksanaan peraturan perundangan mulai dari UUD 1945. Memang benar bahwa demokratisasi adalah proses tanpa akhir karena demokrasi adalah sebuah kondisi yang tidak pernah terwujud secara tuntas. Namun dengan adanya perubahan-perubahan tadi demokrasi di Indonesia telah mempunyai dasar yang kuat untuk berkembang.<sup>3</sup>

Seperti halnya dalam politik memerlukan sebuah strategi untuk mencapai kemenangan partai itu sendiri. Partai politik merupakan suatu keharusan dalam kehidupan politik modern yang demokratis, sebagai suatu organisasi yang terorganisir partai politik secara ideal dimaksudkan untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan tertentu, memberikan jalan kompromi bagi pendapat yang saling bersaing, serta menyediakan saran pemilihan kepemimpinan politik secara absah (*legitimate*) dan damai.<sup>4</sup>

Partai politik (*al-hizb as-siyasi*) menurut pemahaman ilmu politik kontemporer berarti sebuah organisasi yang terdiri dari kelompok orang yang mempunyai nilai-nilai dan tujuan yang sama yaitu merebut atau mempertahankan kekuasaan politik.<sup>5</sup> Partai politik berangkat dari anggapan bahwa dengan membentuk wadah organisasi mereka bisa menyatukan orang-orang yang mempunyai pikiran serupa sehingga pikiran dan orientasi mereka bisa dikonsolidasikan. Dengan begitu pengaruh mereka bisa lebih besar dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan. Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai

---

<sup>3</sup> *Ibid*, 134-135.

<sup>4</sup> Ichlasul Amal, *Teory Mutakhir Partai Politik*, (Yogyakarta: Tiara Mutiara), hal. 11

<sup>5</sup> Rapung Samuddin, *Fiqh Demokrasi: Menguak Kekeliruan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik*, (Jakarta: Gozian Press) hal 214.

orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya.<sup>6</sup>

Salah satu partai yang akan diteliti yaitu Partai demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) adalah sebuah partai politik di Indonesia lahirnya PDIP dapat dikaitnya dengan peristiwa 27 Juli 1996. Dampak politik dari peristiwa ini adalah tampilnya Megawati Soekarnoputri di kancah perpolitikan nasional walupun sebelum peristiwa ini Megawati tercatat sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia dan anggota komisi I DPR, namun setelah peristiwa inilah namanya dikenal di seluruh Indonesia.

Setelah dibukanya keran demokrasi pada masa pemerintahan Presiden Habibie untuk menyongsong Pemilu 1999, PDI-P didirikan pada pemilu ini, PDIP menduduki peringkat pertama untuk suara DPR dengan memperoleh 151 kursi, walaupun demikian PDI-P gagal mengusung Megawati di kursi kepresidenan kalah kalah voting dalam sidang umum MPR 1999 dari Abdurrahman Wahid dan oleh karenanya Megawati menduduki kursi wakil presiden. Setelah abdurrahman wahid turun dari jabatan presiden pada tahun 2001 PDI-P berhasil menempatkan Megawati ke kursi presiden.

Dalam Pemilu Legislatif 2004, perolehan suara PDI-P turun ke peringkat kedua dengan 109 kursi untuk pemilu presiden 2004 PDI-P kembali mencalonkan Megawati sebagai calon presiden berpasangan dengan KH Hasyim Muzadi sebagai calon wakil presiden. Pada Pemilu Legislatif 2009 perolehan suara PDI-P kembali

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hal 403-404.

turun ke peringkat ke-3 dengan jumlah kursi sebanyak 94 kursi. PDI-P kemudian bersama dengan partai Gerindra mengusung pasangan Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto sebagai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu 2009.

Pada Pemilihan Umum Legislatif 2014 kali ini, PDIP berhasil meraih peringkat pertama dan mendapatkan perolehan suara sebanyak 18,95% dan perolehan kursi DPR sebanyak 109 kursi. PDIP bersama partai Nasdem, PKB, Partai Hanura dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia dalam pemilihan presiden 2014 kali ini mengusung Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan mantan Wakil presiden M Jusuf Kalla sebagai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.<sup>7</sup> Hal tersebut diatas membutuhkan perhatian dalam meningkatkan peran dan eksistensi partai politik PDIP yang mana suatu parpol memiliki posisi strategis untuk membangun negara hukum yang adil dan demokratis.

Pemilihan umum 2014 menjadi pertarungan yang sengit sekaligus pembuktian bagi partai-partai yang ada di tengah sikap apatis dan hilangnya kepercayaan masyarakat kepada partai politik sebagai dampak dari perilaku oknum elit partai politik itu sendiri yang terjerat banyak skandal dan kasus korupsi. Ketatnya seleksi partai politik peserta pemilihan umum dan aturan *parlementery threshold* yang meningkat 3,5% dari sebelumnya 2,5%, menjadi cambuk bagi elit partai politik untuk mendapatkan suara sebanyak-banyaknya dalam pemilihan umum 2014 agar partai politiknya lolos ke parlemen. Untuk mendapatkan suara

---

<sup>7</sup> [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Partai\\_Demokrasi\\_Indonesia\\_Perjuangan](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Partai_Demokrasi_Indonesia_Perjuangan). (Diakses pada tanggal 14 Mei 2017 Pukul: 15.45 WIB).

sebanyak-banyaknya diperlukan strategi politik agar masyarakat memilih partai politik tersebut.

Pemilihan presiden 2014 lalu sudah bergulir bahkan sudah ditetapkan pemenangnya oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pilpres tersebut boleh saja sudah berakhir, namun bangsa ini tidak boleh terjerumus dalam pesta demokrasi semata karena perjuangan masih belum berakhir. Dinamika pilpres lalu sangat menguras tenaga, uang dan pikiran. Kontetasi tersebut dimeriahkan oleh dua pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden, nomor urut satu pasangan Prabowo-Hatta Rajasa dan pasangan nomor urut dua Jokowi-Jusuf Kalla.

Keterpilihannya Jokowi-JK sempat diragukan mengingat pada saat itu banyak kabar yang beredar tentang isu miring menimpa pasangan tersebut namun pihaknya tetap mengabaikan kabar tersebut dan fokus terhadap pilpres. Ir. H. Joko Widodo yang biasa dikenal Jokowi merupakan mantan Walikota Solo JawaTengah dia merupakan salah satu kader unggulan di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Semasa menjabat Walikota Solo Jokowi sempat menghebohkan masyarakat nusantara dengan terobosan barunya membuat mobil produksi anak negeri yakni mobil Esemka. Pada saat itu Jokowi menjabat hampir dua periode di Solo berkat terobosannya itu namanya semakin terkenal di telinga masyarakat, karir Jokowi pun dalam bidang politik kian melesat setelah mencalonkan diri menjadi Gubernur Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta pada Oktober 2012 lalu dengan mengalahkan Fauzi Bowo yang merupakan mantan Gubernur DKI Jakarta sebelumnya.

Pada Pemilihan umum Presiden (pilpres) 2014 Jokowi mencalonkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia dengan masa jabatan 2014-2019. Jokowi di usung PDIP yang berpasangan dengan M. Jusuf Kalla merupakan mantan Wakil Presiden RI periode 2004-2009. JK juga sekarang menjabat sebagai ketua Palang Merah Indonesia (PMI) JK juga salah satu orang yang berjasa dalam misi perdamaian di Aceh selain aktif di Partai Golongan Karya (Golkar) JK juga pernah aktif di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Sedangkan lawannya pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa harus menerima karena kalah dalam pilpres. Setelah KPU menetapkan pasangan nomor urut 2 menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI yang sah Prabowo sendiri merupakan ketua umum Partai Gerindra dan Hatta Rajasa merupakan ketua umum Partai Amanat Nasional (PAN). Keduanya didukung oleh parti koalisi yakni Partai Golkar, PPP, Partai Demokrat, PKS. Partai koalisi ini disebut koalisi merah putih (KMP) meski KMP sempat menggugat hasil pilpres ke Mahkamah Konstitusi akan tetapi tidak merubah keputusan KPU.<sup>8</sup>

Dengan demikian berdasarkan permasalahan yang dikemukakan tersebut mendorong penulis untuk lebih jauh meneliti dan mengkaji lebih dalam dengan mengambil judul skripsi “ **Strategi Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam memenangkan pilpres 2014 di Tinjau dari Siyasa Dusturiyah**”. (studi kasus DPD PDI-Perjuangan Jawabarat)

## **B. Rumusan Masalah**

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Wakil Ketua DPD PDI-Perjuangan Daerah Jawabarat (wawancara dilakukan pada tanggal 13 Mei 2017 pukul 14.15 WIB).

Berdasarkan latar belakang diatas mengenai strategi politik PDIP dalam memenangkan pilpres 2014 di tinjau dari siyasah dusturiyah maka penulis membatasi rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Sistem Politik apa yang dilakukan oleh partai politik PDIP dalam memenangkan Pilpres 2014?
2. Bagaimana keberhasilan PDIP dalam menerapkan strategi politik dalam memenangkan pilpres 2014?
3. Bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah mengenai strategi politik PDIP dalam memenangkan pilpres 2014?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui sistem Politik yang dilakukan oleh PDIP dalam memenangkan Pilpres 2014.
2. Untuk mengetahui keberhasilan PDIP menerapkan strategi politiknya dalam memenagkan pilpres 2014.
3. Untuk mengetahui tinjauan siyasah dusturiyah mengenai startegi politik yang digunakan oleh PDIP dalam memangkan pilpres 2014.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan Ilmu Pengetahuan pada umumnya dan Hukum

Tata Negara pada khususnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian.

2. Manfaat praktis, hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan wawasan khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para mahasiswa Hukum Tata Negara mengenai strategi politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam memenangkan pilpres 2014.

### **E. Kerangka Pemikiran**

Dalam menyusun sebuah tulisan ilmiah, maka kerangka teori merupakan bagian yang sangat penting karena di dalam kerangka teori akan dimuat teori-teori yang relevan dalam menjelaskan permasalahan yang sedang diteliti. Kerangka teori ini kemudian akan digunakan sebagai landasan berfikir atau titik tolak dalam penelitian. Oleh karena itu perlu disusun kerangka teori yang memuat pokok-pokok pikiran yang menggambarkan diri dari sudut mana masalah penelitian akan disoroti.

Teori merupakan seperangkat preposisi yang terintegrasi secara sintaksis (yaitu yang mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis atau dengan lainnya dengan data dasar yang dapat diamati) dan berfungsi sebagai wahana untuk menjelaskan fenomena yang diamati.<sup>9</sup>

Penyederhanaan partai politik menjadi syarat agar pemerintahan yang bersifat *presidensial* selalu stabil agar pembangunan dapat berjalan dengan lancar. Menurut kamus besar bahasa Indonesia strategi adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus.<sup>10</sup> Hal tersebut diiringi dengan

---

<sup>9</sup> Boleong, L., *Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press), Hal.39-40.

<sup>10</sup> Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 245.

beratnya persyaratan bagi partai politik untuk mengikuti pemilu dan menjadi partai yang lolos ke parlemen maka dari itu diperlukan suatu strategi politik yang handal dan jitu agar partai politik bisa mengikuti pemilu dan lolos ke parlemen.

Strategi politik merupakan proses menyusun nilai-nilai inti yang sesuai dengan aspirasi para pemilih tertentu, namun juga sesuai dengan visi misi dan sumberdaya kontestan pemilu. Strategi politik terdiri dari tahapan *segmentating, tergeting dan positioning*.<sup>11</sup>

### **Teori Partai Politik**

Partai adalah kelompok orang yang berpandangan sama, yang berjuang memperoleh kekuasaan dan pengaruh didalam pemerintahan, untuk dapat mempengaruhi opini publik dan mewujudkan pandangan politik mereka. Paham Marxisme Lenisme mendefinisikan partai sebagai organisasi politik di mana di dalamnya bergabung berbagai kelas untuk mewakili kepentingan kelompoknya. Menurut Max Weber dalam suatu masyarakat modern, kepemimpinan politik dan opini politik yang handal tidak mungkin terbentuk tanpa adanya partai.<sup>12</sup>

Sedangkan definisi partai politik menurut para ilmuwan politik, Sigmund Neumann mengemukakan bahwa partai politik adalah organisasi artikuatif yang terdiri dari pelaku-pelaku politik yang aktif dalam masyarakat, yaitu mereka yang memusatkan perhatiannya pada menguasai kekuasaan pemerintah dan yang bersaing untuk memperoleh dukungan rakyat, dengan beberapa kelompok lain yang

---

<sup>11</sup> Skripsi, Yosep Saepulloh Repository.uinjkt.ac.id>dspace>bitstream. (diakses pada tanggal 8 Mei 2017, pukul 11.48 WIB).

<sup>12</sup> Peter Schroder, *Strategi Politik*, (Jakarta: Friedrich, 2008) Hal. 147

mempunyai pandangan yang berbeda.<sup>13</sup> Dengan demikian partai politik merupakan perantara atau penghubung antara kekuatan dan ideologi social masyarakat dengan pemerintah.

Yusuf al-Qardhawi mengatakan bahwa partai adalah mazhab dalam politik dan mazhab adalah partai dalam fiqh. Dia menegaskan “ketika kita mengizinkan penerapan multipartai dalam Negara Islam, itu bukan berarti kita membolehkan beragamnya partai dan kelompok yang di dukung oleh orang-orang tertentu yang mempunyai tujuan atau kepentingan sendiri”. Qardhawi menganalogkan partai politik dengan mazhab fiqh. Para pendukung partai tidak ubahnya seperti pengikut mazhab. Masing-masing mereka mendukung apa yang dilihatnya lebih dekat kepada kebenaran dan patut didukung.<sup>14</sup>

Dalam Islam, kata Partai secara bahasa yaitu hizb (hizbullah) yaitu pengikut. Kata hizb dipakai dalam beberapa ayat al-quran, diantaranya Imam Jalalain dalam memahami kata hizb (hizbullah) dalam surat al-maidah ayat 56 dan al-mujadillah ayat 22 sebagai pengikutnya serta orang-orang yang mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangannya. Imam Al-Qurthubi memaknai kata hizb sebagai penolong, sahabat, kelompok, kumpulan orang (rohth). Sementara itu, dalam kamus al-Muhit, disebutkan bahwa partai adalah sekelompok orang. Partai

---

<sup>13</sup> Sigmund Neumann, “Ke Arah Suatu Studi Perbandingan Partai-Partai Politik” dalam Miriam Budiardjo (peny), *Partisipasi dan Partai politik: Sebuah Bunga Rampai*, (Jakarta: Yayasan Obor dan Gramedia, 1981), hlm 61.

<sup>14</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqh Negara: Ijtihad Baru Seputar Sistem Demokrasi Multipartai Keterlibatan Wanita di Dewan Perwakilan Partipasi dalam Pemerintahan Sekuler*, Cet ke-2 (Jakarta- robbani Press, 1999), 194-196

adalah seorang dengan pengikut dan pendukungnya yang mempunyai satu pandangan dan satu nilai.”

Adapun terkait makna politik (siyasah) di sebutkan dalam kamus Al-Muhith bahwa siyasah berasal dari kata sasa-yasusu-siyasatan searti dengan kata ra'iyatan yakni pengurusan. Dengan demikian, politik adalah mengurus urusan umat dengan aturan tertentu. Berdasarkan makna hizbun dan siyasah tadi, maka partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, cita-cita dan tujuan yang sama dalam mengurus rakyat.

Keberadaan partai politik adalah wajib. Kewajiban ini untuk memenuhi seruan Allah swt dalam QS. Al-Imran ayat 104:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.”<sup>15</sup>

Dengan tegas, Allah memerintahkan adanya umat yang berarti kelompok yang terorganisasi. Tujuannya untuk menyerukan Islam, baik dalam konteks menyerukan Islam secara kaffah maupun mengajak orang non muslim agar bersedia memeluk Islam dengan sukarela. Selain itu, juga menyerukan kepada yang makruf

<sup>15</sup> Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, Jakarta: Bumi Restu, 1976

dan mencegah dari tindak kemungkar, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun Negara.<sup>16</sup>

### **Teori Strategi politik**

Strategi politik adalah strategi yang digunakan untuk meralisasikan cita-cita politik. Contohnya adalah pemberlakuan peraturan baru, pembentukan suatu struktur baru dalam administrasi pemerintah atau dijalankanya program deregulasi, privatisasi atau desentralisasi.<sup>17</sup> Tanpa strategi politik perubahan jangka panjang atau proyek-proyek besar sama sekali tidak dapat diwujudkan. Politisi yang baik berusaha merealisasikan rencana yang ambisius tanpa strategi, seringkali menjadi pihak yang harus bertanggung jawab dalam menciptakan kondisi sosial yang menyebabkan jutaan manusia menderita. Dalam strategi politik sangat penting mengenal strategi komunikasi.

Menurut David Horowitz, *Art Of Political War* memiliki enam prinsip berikut:

- 1) Politik adalah perang dengan peralatanlain
- 2) Politik adalah perang merebutkanposisi
- 3) Dalam politik yang menang biasanya adalah sangaggressor
- 4) Posisi didefenisikan dengan kekuatan danharapan
- 5) Senjata politik adalah simbol ketakutan danharapan
- 6) kemenangan selalu berada di pihakrakyat

---

<sup>16</sup> Chandra Purna Irawan, *Hukum Tata Negara Khilafah Islam*, (Bandung: Dzhafira Publishing, 2014), hlm. 432

<sup>17</sup> Peter Scrooder, *Strategi Politik* (Jakarta: FNS, 2009), hlm 5-6

Manajemen politik adalah sebuah seni dan keterampilan tentang perebutan kekuasaan dan alatnya bukanlah mainan anak-anak, dan instrumennya yang disebut dengan ketakutan dan harapan bisa berupa senjata tajam.<sup>18</sup>

Dalam merumuskan strategi, Sun Tzu menjelaskan bahwa dalam pemilihan strategi harus ada hal-hal tertentu yang diprioritaskan, selanjutnya ia berpendapat bentuk yang lain dalam memimpin perang adalah menyerang strategi lawan, kemudian yang terbaik berikutnya adalah menghancurkan aliansi lawan, berikutnya adalah menyerang tentara lawan, sedangkan yang paling buruk adalah menduduki kota-kota yang dibentengi lawan. Untuk dapat menyerang lawan, maka strategi lawan tersebut harus dapat dikenali terlebih dahulu. Oleh karena itu pengenalan atas pihka lawan sangatlah penting. Jika tidak, kita tidak akan dapat mengenali lawan. Penyerangan strategi lawan berarti secara terusmenerus mengganggu jalannya pelaksanaan strategi lawan, sehingga lawan tidak bisa merealisasikan strateginya. Dalam sepak bola hal ini dikenal dengan istilah gangguan dini yang menyebabkan pola permainan tidak dapat dibangun<sup>19</sup>

#### Strategi Politik Menurut Peter Schroder

<b>Strategi Ofensif</b>	<b>Strategi Defensif</b>
Strategi Memperluas Pasar (Strategi Persaingan)	Strategi Mempertahankan Pasar (Strategi Pelanggan,
Strategi Menembus Pasar (Strategi	Strategi Menutup/Menyerahkan

Sumber : Peter Schroder, *Strategi Politik*, 2003

<sup>18</sup>*Ibid*, Hal 622

<sup>19</sup>*Ibid*, Hal 622

Sementara itu untuk membahas strategi politik perlu adanya tinjauan dari konsep pemerintahan dan kenegaraan dalam Islam yang disajikan dalam berbagai aspek kajian siyasah dusturiyah dalam bidang pengangkatan Imam oleh hal ihwal kenegaraan dari segi penyesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta untuk memenuhi kebutuhannya.

Dalam studi fiqih siyasah tidak ditemukan istilah partai politik. Al-Mawardi dalam *al-Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Wilayah al-Diniyyah* tidak menyebut partai politik. Karena di dalam pemikiran politik Islam partai politik belum dikenal. Namun, sejumlah pemikir politik sudah mulai menunjuk pada organisasi yang mewakili rakyat dalam proses politik. Ibnu Khaldun misalnya menjelaskan bahwa negara yang kuat adalah negara yang *ashabiyyah* (solidaritas kelompoknya) kuat. Teori *ashabiyyah* (solidaritas kelompok) ini dapat menjadi embrio dalam mengembangkan kelompok-kelompok politik dalam suatu negara.

Dalam konteks modern, partai politik dalam fiqih siyasah dipadankan dengan istilah *al-hizb*. Istilah ini digunakan oleh Taqiyuddin al-Nabhani untuk menjelaskan organisasinya, Hizbut Tahrir sebagai partai politik. Namun demikian, partai politik yang digagas al-Nabhani bukan sebagai pilar demokrasi seperti yang dikemukakan oleh pemikir Barat. *Hizb* adalah pilar Khilafah Islamiyah.

Sistem politik dalam pandangan Islam adalah hukum atau pandangan yang berkaitan dengan cara mengelola urusan masyarakat agar sesuai dengan hukum Islam. Hal itu dikarenakan politik dalam pandangan Islam adalah mengurus urusan umat dengan menerapkan hukum Islam, baik dalam maupun luar negeri. Oleh

karena itu Islam telah menetapkan asas bagi sistem politiknya, yang terdiri atas empat macam yakni:

1. Kedaulatan di tangan *Syara'* (*as-siyadah li as-syar'i*).
2. Kekuasaan di tangan umat (*as-sulthan li al-ummah*).
3. Pengangkatan khalifah untuk seluruh kaum muslimin hukumnya wajib (*wujub al-khalifah al-wahid li al-muslimin*).
4. Khalifah satu-satunya yang berhak mengadopsi hukum *syara'* untuk dijadikan undang-undang (*li al-khalifah wahdah haqq at-tabanni*).

Jika salah satu dari keempat asas itu tidak ada politik Islam dianggap tidak berjalan. Oleh karena itu keempat asas tersebut merupakan kemestian dalam sistem politik Islam.

Sistem politik Islam sebagian besar merupakan ijtihad, Al-Quran tidak menjabarkan secara detail tentang bentuk pemerintahan, mekanisme dan pelaksanaan lapangan. Akan tetapi, cukup banyak prinsip-prinsip pemerintahan yang perlu menjadi pedoman dalam berpolitik. Hal ini cukup untuk mewarnai sistem politik Islam dan membedakannya dengan sistem politik sekuler atau sistem pemerintahan yang despotik, teokratis dan sebagainya. Selain prinsip dan garis panduan yang diberikan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, Islam memberikan kelonggaran untuk memikirkan kaidah dan bentuk pemerintahan yang diinginkan sesuai tuntunan zaman. Kelonggaran ini mencerminkan dinamika syariat dan rasionalitas Islam. Hal tersebut juga sesuai dengan objektif syariat untuk menjaga kemaslahatan kepentingan manusia. Oleh karena itu, tantangan para ilmuwan Islam adalah membangun teori politik Islam yang berpijak pada kenyataan situasi dan

kondisi hari ini tanpa membuang pedoman yang sudah diberikan oleh *nash-nash* yang *qathi* (teks-teks agama yang definitif).<sup>20</sup>

## **F. Langkah-langkah Penelitian**

### **1. Metode penelitian**

Metode penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, dengan menggunakan metode studi deskriptif, yaitu metode yang berlandaskan pada realitas/gejala/fenomena dan hubungan gejala akibat, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis dan bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian lebih menekankan makna.<sup>21</sup>

penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberi gambaran yang lebih jelas tentang situasi-situasi sosial dengan memusatkan pada aspek-aspek tertentu dan seiring menunjukkan pengaruh antara berbagai variable. Pemilihan metode deskriptif dalam penelitian ini juga karena masalah yang sedang diteliti merupakan yang sudah terjadi dan masih actual.

### **2. Jenis Informasi**

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan jenis data kualitatif, yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat dan gambaran.

### **3. Sumber Informasi**

Berdasarkan jenis data yang telah di temukan maka sumber data dalam penelitian ini adalah :

---

<sup>20</sup> Jubair Situmorang, *Model Pemikiran dan Penelitian Politik Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia), hal. 44-46.

<sup>21</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, cetakan Ke 16, Bandung : Alfabeta, 2012 hal 9.

a. Sumber data Primer

Sumber data primer (pokok) yaitu yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang dibahas. Sumber data yang diperoleh dari pengamatan secara langsung di kantor PDIP Jawa Barat yang berlokasi di Jln. Pelajar Pejuang 45 No.1, Lingkar Selatan, Lengkong Kota Bandung pada tanggal 16 Oktober 2017 pukul 14.00 s/d selesai.

b. Sumber data sekunder yaitu bahan pustaka yang merujuk atau mengutip kepada sumber-sumber primer.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

Pengumpulan data yang dapat dilakukan dalam berbagai sumber dan berbagai cara. Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Misalnya, lewat orang lain atau lewat dokumen. Selanjutnya bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan)

interview (wawancara), kuesioner (angket), dokumentasi dan gabungan keempatnya.<sup>22</sup>

Pengumpulan data yang bersifat primer diperoleh dari data PDIP Jawa Barat dengan melalui observasi dan wawancara. Sedangkan untuk data yang bersifat sekunder seperti teori, pandangan-pandangan, hasil penelitian, buku, arsip lainnya digunakan studi dokumentasi dan kepustakaan

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah penelitian terhadap teks atau sumber pustaka tertentu atau mencari berbagai buku yang berkaitan dengan Strategi politik partai.

b. Obsevasi

Sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam lainnya. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.

c. Wawancara

Digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Dalam wawancara dilakukan Tanya jawab oleh pewawancara mengajukan pertanyaan dan yang di wawancarai

---

<sup>22</sup> Ibid, Hal 224-225.

memberikan jawaban keterangan atau data sesuai dengan tujuan penelitian.

d. **Dokumentasi**

Adalah salah satu teknik pengumpulan data kualitatif penulis mendapat dokumentasi dengan cara menyalin dokumen dan data dari Kantor atau Dinas yang bersangkutan.

**5. Analisis Data**

Proses analisis data dalam penelitian ini dimulai dengan menelaah secara keseluruhan unit analisis yang ada dan tersedia dari berbagai sumber yaitu dengan strategi-strategi apa yang dilakukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk memenangkan pilpres mengklasifikasikan seluruh data sesuai dengan pertanyaan penelitian. Dan yang terakhir menarik kesimpulan tertentu sesuai dengan perumusan masalah yang telah dianalisis.

